

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alhamdi, R. (2012). *Dinamika Islam dan Elite-elit Politik Muhammadiyah . Jurnal Studi Pemerintahan: Journal Of Goverment and Politics .*
- Choirunisa, N. (2018). *Analisis Agenda Setting Dalam Proses Perumusan Program Desa Layak Anak.* Bandar Lampung : FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG .
- Effendi. (2005). *Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Klingdon, J. W. (2003). *Agendas, Alternatives, and Publik Politicies.* New York : Wesley Educationnal Publisher .
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Musanef. (1996). *Manajemen Kepegawaian Negara.* Jakarta: Toko Gunung Agung .
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parson, W. (2001). *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Parsons, W. (2005). *Pengantar Teori dan Praktis Analisis Kebijakan .* Jakarta : Pernada Media Group.
- Solahuddin, K. (2010). *Model Aktor Kebijakan Pubik.* Yogyakarta : Gava Media .
- Sulistyo, A. (2007). *Konsep Sistem Penggajian PNS di Indonesia.* LAN.
- Sugandi, Y. S. (2011). *Administrasi Publik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Santoso, Purwo, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Center of Politics and Government, JPP UGM.

Tamim, F. (2004). *Reformasi Birokrasi : Analisis Pemberdayaan Aparatur Negara*. Jakarta : Belantika.

Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik* . Malang: Bayumedia .

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, Proses dan Studi Kasus* . Yogyakarta: Buku Seru.

Parson, W. (2001). *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

## **B. Jurnal**

Agustina, T., & Irwansyah. (2017). Peran Agenda Setting Media Massa Dalam Kebijakan Penetapan Hega Eceran Tertinggi (HET) Beras Oleh Pemerintah. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* .

Puspita, R. I. (2016). *Analisis Penyusunan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran RTRW Oleh Industri CV. Evergreen Indogarment*. Semarang : Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.

Rahmi, H. (2018). Analisis Agenda Setting Terhadap Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) (Studi Kasus Perencanaan Pemekaran di Kabupaten Bungo). *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram*.

Kusuma, & Tirta, L. S. (2007). *Agenda Setting Kebijakan Publik (Studi Kajian Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Loupatty, G. K., & Kosandi, M. (2015). Peran Oprah Winfrey dalam Proses Agenda Setting Pembuatan Kebijakan "No Texting while Driving"di Negara Bagian Michingan, Amerika Serikat Tahun 2010. *Jurnal Ilmu Politik*.

Maman. (2016). Agenda Setting Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.

*Jurnal Ilmu Pemerintahan* .

Nasionalita, K. (2015). Relevansi Teori Agenda Setting Dalam Dunia Tanpa Batas. *Jurnal Ilmu*

*Komunikasi*.

Natalia, M. (2017). Agenda Setting Berita Pedofilia di Samarinda Pos. *eJournal Ilmu*

*Komunikasi*.

Rustan, Wismono, F. H., Hidayah, K., & Luthfi, W. (2017). Analisis Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Metode Indeks Intensif Jabatan.

*Jurnal Borneo Administrator* , 151.

Syafei, M. (2016). *Agenda Setting Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tahun 2011-2015*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan

UMY.

### **C. Peraturan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri